

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA NEGERI DI ATAS AWAN (LOLAI) KABUPATEN TORAJA UTARA

**Herman H^{1*}, Muh. Irvan Nur' iva², Andi Asripan³, Sri Devita Pasae⁴, Nur Izzantunnisa Has⁵,
Putri Rabiah El Adawiyah⁶, Putri Amalia Ilyas⁷**

^{1,2,4,5,6,7}Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

³Program Studi Pendidikan Bahas Inggris, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

Email Korespondensi: hermandody@unm.ac.id

Email: m.irvan.nuriva@unm.ac.id; andi.asrifan@unm.ac.id; sridevitapasae22@gmail.com;

nurizzaatun04@gmail.com; putrirea30@gmail.com; putriamal54@gmail.com

ABSTRACT

Collaboration between actors in the process of developing tourist attractions often does not go well. The main issue in this study is how the government builds good relations with the private sector and the community in developing the Lolai tourist attractions. This study aims to analyze the form of collaboration in the development of tourist attractions in the Land of the Clouds (Lolai) in North Toraja Regency. This type of research is qualitative and descriptive, aiming to describe the phenomenon that occurs. Data was collected through direct interviews with employees of the North Toraja Regency Tourism Office, tourist attraction managers, the community around the tourist attraction, as well as tourists, field observations, and documentation by collecting documents either in the form of writings, pictures, literature, or readings related to the research topic. The results of the study show that the existing collaboration is still in the early stages where face-to-face dialogue has not been optimally conducted, the level of trust between parties has not been formed, the government's commitment is strong but in its implementation is still weak, mutual understanding has begun to form but there are still differences in priorities, and provisional results show an increase as evidenced by the increase in tourist visits and the existence of community initiatives in the preservation of objects Lolai. For this reason, the government needs to strengthen participatory collaborative mechanisms by establishing regular communication forums between the government, the private sector, in this case tourist attraction managers, and the community.

Keywords: Collaboration; Development; Tourism.

ABSTRAK

Kolaborasi antara para aktor dalam proses pengembangan objek wisata seringkali tidak berjalan dengan baik. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah membangun hubungan yang baik dengan pihak swasta serta masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Lolai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Negeri di Atas Awan (Lolai) di Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan pegawai Dinas Pariwisata Kab. Toraja Utara, pengelola objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata, serta wisatawan, observasi lapangan, dokumentasi dengan cara pengumpulan dokumen baik berupa tulisan, gambar, literature, ataupun bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada masih berada pada tahap awal dimana dialog tatap muka belum berjalan secara maksimal, tingkat kepercayaan antar pihak belum terbentuk, komitmen pemerintah kuat tetapi dalam implementasinya masih lemah, pemahaman bersama mulai terbentuk namun masih terdapat perbedaan prioritas, serta hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan yang dibuktikan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan serta adanya inisiatif masyarakat dalam pelestarian objek wisata

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
edaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

457

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Lolai. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme kolaboratif yang partisipatif dengan membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah, pihak swasta dalam hal ini pengelola objek wisata, serta masyarakat.

Kata kunci: Kolaborasi, Pengembangan, Pariwisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik perhatian seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya objek wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan suatu bidang pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dan didukung oleh sarana dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah baik pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, menekankan pada pengembangan sektor pariwisata yang lebih modern dan selaras dengan perkembangan global, termasuk penekanan pada keberlanjutan dan kolaborasi multi stakeholder. Pengembangan pariwisata di Indonesia seringkali mengalami berbagai permasalahan baik dari faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Salah satu tantangan yang masih sering muncul dalam pengembangan suatu objek wisata adalah adanya pengembangan infrastruktur yang masih belum merata, dimana terdapat beberapa objek wisata yang masih sulit untuk diakses. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi hambatan dalam pengembangan suatu objek wisata, hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan dan keterampilan yang menyebabkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola suatu objek wisata.

Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata merupakan bentuk kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan diberbagai sektor pariwisata untuk mencapai tujuan bersama seperti membuat destinasi wisata lebih menarik, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kolaborasi dalam suatu pengembangan pariwisata biasanya melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah, pihak swasta, UMKM, serta masyarakat. Peran pemerintah dalam pengembangan suatu objek wisata yaitu menyediakan infrastruktur, menyusun regulasi dalam pengelolaan pariwisata, mengembangkan promosi wisata, serta memberikan modal dan pelatihan terhadap pelaku usaha lokal seperti UMKM. Pihak swasta juga berperan penting dalam pengembangan suatu objek wisata, dengan adanya pihak swasta pengelolaan operasional destinasi wisata dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan umum yang seringkali terjadi dalam kolaborasi pengembangan objek wisata karena sifat kerjasama ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu berjalan mulus meskipun tujuannya untuk menjadikan suatu objek wisata menjadi lebih baik seperti peningkatan ekonomi dan keberlanjutan. Salah satu isu utama yang sering terjadi adalah konflik kepentingan antar para pihak yang terlibat, dimana pemerintah seringkali memprioritaskan regulasi ketat untuk melindungi lingkungan sementara pihak swasta lebih fokus pada keuntungan yang cepat melalui pembangunan besar-besaran, yang bisa mengakibatkan ketegangan dan kurangnya komitmen jangka panjang.

Proses kolaborasi dalam pengembangan objek wisata merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu objek wisata. Tetapi pada kenyataannya seringkali proses kolaborasi antar pihak dalam pengembangan objek wisata tidak berjalan dengan baik di beberapa objek wisata yang ada, khususnya pada objek wisata Negeri di Atas Awan (Lolai). Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata tersebut memiliki peranan yang penting dalam memperkuat kapasitas dan akses pasar bagi para pelaku lokal, serta menciptakan keselarasan dalam pengembangan objek wisata dengan nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, hal tersebut perlu diketahui mengenai bagaimana para pihak dalam melakukan kolaborasi dalam hal komunikasi untuk mengetahui tugas serta fungsi masing-masing pihak, cara membangun kepercayaan, bagaimana komitmen para pihak dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

458

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

menjalankan proses pengembangan, serta cara untuk mencapai kesamaan tujuan dalam pengembangan objek wisata yang berkelanjutan.

Dalam pemberian kolaborasi pengembangan yang baik bagi stekholder bukan suatu hal yang mudah, tapi perlu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk keinginan untuk mencapai kepuasan secara langsung. Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam teori Collaborative Governance, keberhasilan suatu kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pihak yang terlibat, melainkan oleh proses interaksi yang terbangun di antara mereka. Teori ini menyoroti empat elemen utama yang menjadi dasar hubungan kolaboratif yang efektif, yaitu: 1) face-to-face dialogue (Dialog tatap muka), Dalam ranah pengembangan pariwisata, interaksi langsung diadakan melalui forum diskusi, musyawarah tingkat desa, atau rapat antar-pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mekanisme ini memungkinkan komunitas setempat, pelaku usaha, serta pemerintah untuk mencapai kesepakatan mengenai strategi pengelolaan destinasi wisata dengan pendekatan partisipatif. 2) trust building (Membangun kepercayaan), Dalam konteks pengembangan pariwisata, rasa saling percaya di antara para pelaku dapat berkembang jika pemerintah menyediakan kesempatan partisipasi bagi komunitas, pelaku usaha menunjukkan keterbukaan, dan semua pihak memegang teguh kesepakatan yang telah dicapai. Rasa percaya yang kokoh ini memotivasi keterlibatan yang dinamis serta rasa kepemilikan terhadap inisiatif pariwisata. 3) commitment to the process (Komitmen terhadap proses), Pada pengembangan destinasi wisata, komitmen tersebut tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan, konsistensi pelaku usaha dalam memasarkan produk lokal, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah terhadap regulasi dan infrastruktur pendukung pariwisata. dan 4) shared understanding (Pemahaman Bersama), Dalam ranah pariwisata, konsensus bersama ini meliputi kesepakatan untuk memajukan destinasi dengan pendekatan lestari, melestarikan kearifan lokal, serta menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. 5) intermediate outcomes (Hasil sementara), Hasil awal atau dampak menengah yang muncul selama proses kerja sama dikenal sebagai hasil menengah. Hasil menengah bukan hasil akhir, tetapi mereka menunjukkan keberhasilan kerja sama.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sefira et.al, (2022) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)”. Hasil Kajian menyimpulkan bahwa daerah ini memiliki potensi wisata yang cukup tinggi dengan empat destinasi wisata utama, yaitu Air Terjun Sedudo, Air Merambat Roro Kuning, Goa Margotresno, dan Taman Rekreasi Anjuk Ladang yang berada dibawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Meski demikian, pengelolaan dan pengembangan pariwisata di daerah ini belum berjalan maksimal karena keterbatasan dana serta ketidadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengembangan sektor pariwisata. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap menunjukkan sikap optimis dalam menjalankan berbagai program pengembangan, mengingat potensi wisata Kabupaten Nganjuk diyakini mampu bersaing dengan destinasi dari daerah lain.

Peneliti terdahulu yang dilakukan Daniela Chimirri (2019) “Collaborative configurations of tourism development: a Greenlandic example”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi merupakan elemen esensial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi bukan hanya alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga mekanisme sosial yang menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kesetaraan antaraktor. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap konsep kolaborasi dalam pariwisata dan merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan untuk menghubungkan antara kolaborasi dalam teori dan praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus eksploratif melalui lokakarya kolaboratif (workshop) yang melibatkan berbagai pihak di Greenland Selatan.

Fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui berbagai bentuk dan mekanisme kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan objek wisata Negeri di Atas Awan (Lolai) di Kabupaten Toraja Utara, serta bagaimana kolaborasi ini mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, berpartisipasi, dan berbasis Masyarakat dengan menyoroti lima aspek utama kolaborasi, yaitu face-to-face dialogue,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

459

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes, serta bagaimana kelimanya berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana bentuk dan proses kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Negeri di Atas Awan (Lolai) yang terletak di Kabupaten Toraja Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi. Adapun data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara langsung dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari publikasi berupa jurnal ataupun dokumen yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pengamatan atau observasi secara langsung seperti wawancara yang dilakukan melalui percakapan dengan informan yang terkait dengan penelitian serta dokumentasi dengan cara pengumpulan dokumen baik berupa tulisan, gambar, literature, maupun bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, reduksi data dimana data yang diperoleh kemudian dirangkum serta difokuskan pada hasil yang penting, kemudian penyajian data dimana data yang telah direduksi kemudian disusun dan dibentuk dalam pola hubungan agar lebih mudah dipahami, kemudian penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan tentang topik yang sedang dikaji.

PEMBAHASAN

Kolaborasi dalam Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan objek wisata merupakan suatu proses untuk merencanakan, membangun, dan memelihara situs atau fasilitas wisata agar menarik wisatawan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun budaya bagi suatu daerah. Hal tersebut melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kolaborasi dalam proses pengembangan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang suatu pengembangan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adanya kolaborasi yang baik akan membentuk kerjasama yang efektif, inklusif, serta berkelanjutan oleh para aktor yang terlibat didalamnya, dimana hasil dari kolaborasi tersebut akan memberikan dampak positif yang holistik. Pengembangan pada objek wisata Negeri di Atas Awan (Lolai) masih dalam tahap pengembangan awal dimana pengembangan objek wisata yang ada belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dimana terdapat beberapa komponen penting dalam suatu objek wisata yang belum mengalami pengembangan seperti akses menuju objek wisata, fasilitas yang ada, serta amenitas yang menunjang wisatawan pada saat berkunjung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell & Gash (2008) yang meliputi face to face dialogue (dialog tatap muka), trust building (pembangunan kepercayaan), commitment to the process (komitmen terhadap proses), shared understanding (pemahaman bersama), intermediate outcomes (hasil sementara), maka diperoleh hasil yang dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

460

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Tabel 1: Hasil Penelitian Kolaborasi dalam Pengembangan Objek Wisata Negeri di Atas Awan (Lolai) pada Kabupaten Toraja Utara

No.	Indikator	Temuan Kunci/key finding	Sumber Pengumpulan Data
1.	Face to face dialogue (dialog tatap muka)	Pertemuan rutin hanya dilakukan satu kali sebulan dengan agenda memberikan pelatihan kepada pengelola objek wisata seperti (manajemen hotel dan restoran serta pengelolaan destinasi wisata	Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menyatakan bahwa “Pemerintah hanya fokus dengan pengembangan SDM sehingga pemerintah hanya melakukan pertemuan rutin selama satu kali dalam satu bulan dengan agenda manajemen hotel dan restaurant serta pengelolaan objek wisata.”
2.	Trust building (pembangunan kepercayaan)	Kepercayaan pihak swasta dan masyarakat terhadap pemerintah belum terbentuk dikarenakan kurangnya transparansi dari pemerintah.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola objek wisata Lolai, yang menyatakan bahwa “Belum adanya transparansi dari pemerintah khususnya dalam pengelolaan dana dari objek wisata. Bukan hanya itu, hingga saat ini belum adanya regulasi mengenai pembagian bagi hasil antara pemilik objek wisata dengan pemerintah.”
3.	Commitment to the process (komitmen terhadap proses)	Para aktor memiliki komitmen dalam pengembangan objek wisata Lolai. Hanya saja dalam implementasinya belum mencapai hasil yang optimal.	Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa “Pemerintah maupun pihak swasta serta masyarakat sama-sama memiliki komitmen terhadap pengembangan objek wisata Lolai. Hal tersebut dapat di lihat dari adanya program pemerintah yaitu Master Plan serta adanya dukungan dari pihak swasta maupun masyarakat. Meskipun dalam implementasinya hingga saat ini belum mencapai hasil yang optimal.”
4.	Shared understanding (pemahaman bersama)	Pemerintah serta pihak swasta maupun masyarakat memiliki pemahaman yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan melalui pariwisata. Namun, terdapat juga	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Lolai, bahwa “Pemerintah serta pihak swasta dan masyarakat memiliki pemahaman yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

461

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

		perbedaan paradigma antara para aktor mengenai tujuan dari pengembangan tersebut.	sama mengenai pengembangan objek wisata Lolai untuk peningkatan kesejahteraan, hanya saja terdapat perbedaan prioritas dimana pemerintah fokus pada peningkatan pendapatan sedangkan pihak swasta fokus pada pelestarian adat dan budaya yang ada di Lolai.”
5.	Intermediate outcome (hasil sementara)	Hasil sementara dari kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Lolai yaitu adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan hingga saat ini serta adanya kesadaran dan dukungan dari pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan objek wisata Lolai.	Berdasarkan hasil dari keempat indikator yang ada, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara para aktor dalam pengembangan objek wisata Lolai telah mencapai hasil sementara yaitu dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu serta adanya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam pengembangan objek wisata Lolai.

Berdasarkan teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Lolai dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu:

Face-to-face Dialogue dalam Pengembangan Objek Wisata

Ansell dan Gash (2008), dialog langsung yang berkualitas memungkinkan pembentukan kepercayaan dan pemahaman bersama di antara para aktor. Ruang diskusi yang memberikan ruang untuk para aktor tentunya akan menghasilkan kolaborasi yang komunikatif, sejalan, serta searah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa face-to-face dialogue antara para aktor pada objek wisata Lolai hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas semata tanpa komunikasi dua arah antara para aktor. Hal tersebut menyebabkan masyarakat maupun pengelola objek wisata menilai bahwa pertemuan yang dilakukan hanya untuk memberi informasi tanpa adanya dialog yang terjadi. Pemerintah hanya melakukan pertemuan rutin satu kali dalam sebulan dengan agenda memberikan pelatihan kepada para pengelola objek wisata Lolai tanpa adanya diskusi mengenai pengembangan objek wisata Lolai.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa dialog tatap muka yang menjadi salah satu indikator penting dalam kolaborasi antara para aktor belum terlaksana secara maksimal, sehingga menyebabkan adanya asimetri komunikasi yang menghambat kepercayaan antara pemerintah dengan pihak swasta serta masyarakat.

Trust Building dalam Pembangunan Objek Wisata

Trust building adalah indikator krusial dalam proses kolaborasi yang dapat membuat para aktor yang terlibat bekerja sama secara efektif dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Trust building

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

462

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

membutuhkan komunikasi yang intensif serta berkelanjutan dapat melalui face to face dialoge agar kepercayaan antar para pihak dapat terbangun.

Kolaborasi dalam proses pengembangan objek wisata Lolai menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih beragam. Kurangnya face to face dialogue dapat menjadi salah satu penyebab adanya ketidakpercayaan pihak swasta dan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat serta pihak swasta dalam hal ini pengelola objek wisata terhadap pemerintah belum terjalin dengan baik khususnya terhadap transparansi pengelolaan dana dan mekanisme bagi hasil. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum munculnya regulasi yang jelas untuk mengatur terkait mekanisme bagi hasil, dikarenakan pada objek wisata Lolai masih berdiri di atas tanah adat atau milik pribadi sehingga regulasi mengenai mekanisme bagi hasil harus jelas.

Adanya kepercayaan yang belum terbangun oleh para aktor menunjukkan bahwa trust building belum terbentuk secara maksimal sehingga memerlukan konsistensi komunikasi yang lebih terbuka, transparansi dalam hal pengelolaan dana pariwisata, serta regulasi yang jelas mengenai mekanisme bagi hasil antara pemerintah dan pihak swasta.

Commitment to the process dalam pengembangan Objek Wisata

Indikator ini menilai sejauh mana setiap aktor berkomitmen dalam mempertahankan kolaborasi jangka panjang untuk mencapai tujuan pengembangan berkelanjutan. Komitmen para aktor dalam dalam proses kolaborasi adalah dimana aktor yang terlibat mengikuti dan melaksanakan semua tahapan dan aturan yang telah disepakati.

Komitmen para aktor dalam pengembangan objek wisata Lolai menunjukkan hasil yang baik, dimana pemerintah memiliki komitmen yang kuat melalui program Master Plan Wisata Alam Lolai yang bertujuan menerapkan strategi konservasi alam dan budaya untuk meningkatkan minat kunjungan para wisatawan. Pengelola objek wisata serta masyarakat pun menunjukkan komitmen dengan tetap mendukung kegiatan wisata seperti menyediakan fasilitas serta amenitas serta menjual produk-produk lokal.

Meskipun, para aktor memiliki komitmen yang kuat terhadap proses pengembangan objek wisata Lolai tetapi masih terdapat kendala dikarenakan adanya keterbatasan dana yang menyebabkan pada beberapa tempat akses menuju objek wisata belum memadai, konflik mengenai batas tanah adat juga masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan objek wisata Lolai.

Shared understanding dalam Pengembangan Objek Wisata

Pemahaman bersama merupakan proses kolaboratif dimana semua pemangku kepentingan membangun pemahaman yang sama dengan tujuan, permasalahan, nilai-nilai dasar, dan peran masing-masing aktor yang terlibat.

Shared understanding antara para aktor dalam pengembangan objek wisata Lolai belum sepenuhnya terbentuk. Pemerintah berpendapat bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata, fokus utama adalah peningkatan pendapatan daerah tanpa menjadikan pelestarian adat dan tradisi sebagai sebagai salah satu faktor utama. Namun, bagi masyarakat pelestarian adat dan tradisi merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan melalui sektor pariwisata.

Adanya perbedaan paradigma tersebut menyebabkan banyak aktivitas budaya sering kali dikomersialkan tanpa adanya penjelasan konteks adat yang utuh sehingga sentuhan asli budaya Toraja kian memudar. Hal tersebut menjadi bukti bahwa shared understanding dalam kolaborasi pengembangan objek wisata Lolai belum terjalin dengan baik dan masih membutuhkan komunikasi serta refleksi berulang antar para aktor yang terlibat.

Intermediate Outcomes dalam Pengembangan Objek Wisata

Intermediate outcomes adalah hasil yang dicapai dalam proses kolaborasi sebelum tujuan akhir

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

463

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Lolai mulai menghasilkan beberapa intermediate outcomes meskipun belum optimal.

Salah satu intermediate outcomes yang ditemukan yaitu adanya jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat dikarenakan adanya promosi, fasilitas, serta aksesibilitas yang cukup memadai serta adanya dukungan serta partisipasi dari pihak swasta maupun masyarakat setempat yang ikut menjaga kelestarian objek wisata. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum memadai dan adanya manfaat ekonomi yang belum merata, sehingga hal tersebut memerlukan koordinasi yang konsisten untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam perspektif teori Collaborative Governance, keberhasilan kolaborasi diukur bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari proses partisipatif yang terjadi di sepanjang jalan (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, kolaborasi dalam pengembangan pada objek wisata Lolai masih berada pada tahap starting condition yang ditandai dengan adanya empat indikator yang masih memerlukan penguatan. Pada keempat indikator yang ada yang pertama face to face dialogue, komunikasi belum terjalin dengan baik dikarenakan kurang optimalnya pertemuan yang rutin antara para aktor. Indikator yang kedua trust building, kepercayaan para aktor belum terjalin dengan baik dikarenakan kurangnya transparansi pemerintah dalam hal pengelolaan pendapatan serta kurangnya regulasi mengenai pembagian bagi hasil. Ketiga commitment to the process, para aktor dalam pengembangan objek wisata Lolai memiliki komitmen yang kuat dalam proses kolaborasi yang ada. Hanya saja dalam implementasinya masih terdapat beberapa hal yang belum optimal. Keempat shared understanding, terdapat perbedaan paradigma dalam pemahaman para aktor untuk pengembangan objek wisata Lolai sehingga masih memerlukan komunikasi serta refleksi berulang antar para aktor yang terlibat. Berdasarkan indikator dari Ansell dan Gash (2008) kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Lolai masih memerlukan penguatan seperti komunikasi, pemahaman bersama, kepercayaan, serta komitmen yang didukung dengan implementasi yang optimal

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Lolai di Tanah Toraja masih bersifat parsial dan belum mencapai tahap kolaborasi yang matang. Berdasarkan teori Collaborative Governance Ansell & Gash (2008), dari lima indikator yang ada hanya ada satu indikator yang menunjukkan adanya kemajuan yaitu intermediate outcomes, dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan melalui promosi serta adanya kelompok yang menjaga kelestarian objek wisata. Tetapi, empat indikator yang lain masih memerlukan penguatan sehingga terbentuknya kolaborasi yang bai kantar berbagai aktor.

Kendala utama terletak pada komunikasi yang tidak setara, rendahnya transparansi, lemahnya implementasi kebijakan, dan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang makna kesejahteraan. Faktor regulasi tanah adat turut memperumit proses kolaborasi karena belum adanya kejelasan hukum yang menjamin kepentingan bersama. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Lolai perlu diarahkan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk pelestarian budaya dan kedaulatan tanah adat. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat mekanisme kolaboratif yang partisipatif dengan membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah, pihak swasta dalam hal ini pengelola objek wisata, serta masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperjelas regulasi pemanfaatan tanah adat melalui peraturan daerah yang mengakui hak yang dimiliki masyarakat Toraja. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar kolaborasi dapat berjalan produktif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

464

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

REFERENSI

- Andi Cudai Nur, Haedar Akib, Risma Niswaty, Aslinda, H. Z. (2019). Development partnership strategy tourism destinations integrated and infrastructure in south sulawesi indonesia. *ASIA PACIFIC SOCIETY FOR PUBLIC AFFAIRS (APSPA), August.*
- Bare, R. R., Akib, H., Samad, S., D. (2021). Daya Saing Destinasi Pariwisata berbasis Kompetensi Lokal: Bukti dari Indonesia. *Universitas Negeri Makassar.*
- Dula, R. (2022). Analisis Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daera Kabupaten Ende. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Gamal, S. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata. 2nd Ed. Yogyakarta:Andi.
- Ismayanti. (2020). Dasar-Dasar Pariwisata. *Universitas Sahid Jakarta.*
- Kumaat, D. T. & H. (2020). *Pengantar Pariwisata* (pp. 1–23). POLIMDO PRESS.
- M. Liga Suryadana, & Octavia, V. (2015). Pengantar Pemasaran Pariwisata. *Bandung Alfabeta.*
- Soebagyo. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi.*
- Sofyan, A.M., & Noor, A. . (2016). Perencanaan Konten Aplikasi Travel Guide Berbasis Android Menggunakan Identifikasi Komponen Pariwisata 6 (Enam) A. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar.*
- Sondang P. Siagian. (2018). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. *PT Bumi Aksara.*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

465

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

